

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia, Kota Medan saat ini menghadapi tekanan tata ruang yang sangat berat dalam pengelolaan parkir. Masalah utama berakar dari ketidakseimbangan mobilitas, di mana pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang agresif mencapai rata-rata 10% per tahun (berdasarkan data Samsat dan Badan Pusat Statistik Kota Medan). Lonjakan ini tidak sebanding dengan perluasan panjang jalan baru yang tumbuh sangat lambat di bawah 1% per tahun. Kondisi ini berdampak langsung pada kemacetan, berkurangnya ruang publik akibat parkir liar, serta merosotnya kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Dari 656 ruas jalan yang ada, baru 150 ruas yang menerapkan sistem berbasis barcode (Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan), menunjukkan masih terbatasnya jangkauan modernisasi pengelolaan parkir.

Dampak paling nyata dari sistem konvensional yang selama ini berlangsung adalah tingginya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Data Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa sebelum penerapan sistem digital, rata-rata kebocoran retribusi parkir mencapai 40-50 persen dari potensi pendapatan aktual. Hal ini berdampak pada hilangnya penerimaan daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur kota. Selain itu, praktik pungutan liar (pungli) yang marak di lokasi parkir tradisional berdampak pada ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat yang harus membayar lebih dari tarif resmi.

Pemerintah Kota Medan kemudian merespons dengan meluncurkan sistem E-Parking pada tahun 2021. Dampak dari kebijakan ini segera terlihat. Dalam periode 24 hari penerapan pada 22 titik lokasi parkir tepi jalan, PAD meningkat dari sekitar Rp80 juta menjadi Rp200 juta, atau melonjak lebih dari 150 persen. Pada bulan pertama, peningkatan mencapai 155 persen dengan realisasi Rp123 juta. Lebih penting lagi, sistem ini berhasil menekan tingkat kebocoran pendapatan dari 40-50 persen menjadi di bawah 10 persen. Dengan kata lain, efektivitas penyerapan PAD meningkat dari sekitar 50-60 persen menjadi lebih dari 90 persen. Dampak nominalnya juga signifikan: jika potensi retribusi dari 150 ruas jalan mencapai Rp15 miliar per tahun, maka peningkatan efektivitas sebesar 40 persen berdampak pada tambahan PAD sekitar Rp6 miliar per tahun (Pemerintah Kota Medan ([pemkomedan.go.id](http://pemkomedan.go.id))).

Namun demikian, implementasi E-Parking juga membawa sejumlah dampak negatif. Resistensi masyarakat terhadap transaksi non-tunai menjadi kendala utama, terutama bagi kelompok yang kurang familiar dengan teknologi digital. Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya tingkat adopsi di luar kawasan tertentu. Selain itu, masih ditemukan oknum juru parkir yang menyalahgunakan sistem, sehingga dampak positif terhadap transparansi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Menyikapi berbagai dampak tersebut, Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode mulai 1 Juli 2024. Kebijakan ini membawa dampak signifikan terhadap struktur biaya yang ditanggung masyarakat. Berdasarkan perhitungan Dinas Perhubungan, pengendara sepeda motor rata-rata

membayar Rp4.000 per hari atau lebih dari Rp100.000 per bulan untuk parkir konvensional. Dengan tarif berlangganan tahunan hanya Rp90.000, dampaknya terhadap pengeluaran masyarakat sangat besar: biaya parkir tahunan turun dari sekitar Rp1.460.000 menjadi hanya Rp90.000, atau terjadi penghematan sebesar Rp1.370.000. Tingkat efektivitas biaya mencapai 94 persen (*pemkomedan.go.id*). Untuk kendaraan roda empat, dengan tarif harian Rp5.000-10.000, penghematan tahunan mencapai Rp1,7-3,5 juta, dengan efektivitas biaya 93-96 persen (*pemkomedan.go.id*).

Dampak psikologis juga tidak kalah penting. Kepastian biaya parkir selama satu tahun ke depan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang sebelumnya harus selalu menyediakan uang tunai setiap kali parkir. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga berdampak pada munculnya beban biaya di awal tahun bagi mereka yang memilih membeli stiker, yang mungkin memberatkan sebagian masyarakat dengan arus kas terbatas.

Dari perspektif pendapatan daerah, dampak kebijakan parkir berlangganan masih menunjukkan hasil yang beragam. Tingkat adopsi di kalangan institusi seperti Kejaksaan Negeri Medan mencapai 80 persen, yang berdampak pada kepatuhan yang tinggi di lingkungan tersebut. Namun secara keseluruhan, target PAD dari retribusi parkir tepi jalan yang ditetapkan sekitar Rp150 miliar per tahun masih jauh dari realisasi. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan yang dianggarkan dari sektor tersebut (*jdih.pemkomedan.go.id*).

Dampak sosial yang paling menonjol dari kebijakan ini adalah munculnya kebingungan di masyarakat akibat dualisme sistem. Meskipun pemerintah

menetapkan bahwa stiker barcode berlaku di seluruh lokasi parkir tepi jalan, kenyataan di lapangan berdampak pada masih banyaknya juru parkir yang tetap memungut tunai. Dampaknya, masyarakat yang telah membeli stiker justru mengalami ketidakpastian dan ketidaknyamanan karena tetap dimintai pembayaran. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mengakui bahwa masih terdapat juru parkir nakal yang mengabaikan ketentuan tersebut, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ini.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah resistensi dari kelompok masyarakat yang kurang terbiasa dengan sistem digital. Keterbatasan akses terhadap layanan perbankan digital dan kurangnya informasi mengenai lokasi pembelian stiker fisik berdampak pada terhambatnya adopsi kebijakan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok lanjut usia. Hal ini menciptakan dampak ketimpangan akses terhadap kemudahan dan penghematan biaya yang ditawarkan sistem berlangganan.

Penelitian mengenai dampak kebijakan parkir berlangganan di Kota Medan masih sangat terbatas. Sebagian besar studi yang ada lebih menekankan pada aspek teknis atau finansial, tanpa mengeksplorasi secara mendalam dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari sudut pandang masyarakat. Padahal, pemahaman yang komprehensif tentang berbagai dampak ini sangat diperlukan untuk penyempurnaan kebijakan di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai dampak dari implementasi kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode di Kota Medan, meliputi dampak ekonomi (penghematan biaya

dan perubahan pendapatan daerah), dampak sosial (perubahan pola interaksi, kepatuhan, dan resistensi masyarakat), dampak psikologis (kepuasan, kepastian, dan kebingungan), serta dampak operasional (efektivitas sistem dan pengawasan). Melalui pemahaman yang holistik tentang dampak-dampak tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan parkir yang lebih baik dan lebih berpihak kepada masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana dampak implementasi kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode di Kota Medan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menganalisis efektivitas implementasi sistem parkir berlangganan barcode di kota Medan dalam mengelola parkir kendaraan..

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai sistem Parkir Berlangganan di Indonesia, khususnya yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan teknologi dalam implementasi sistem parkir berbasis teknologi. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan baru tentang tantangan yang dihadapi masyarakat dalam beradaptasi dengan teknologi baru serta dampaknya terhadap pengelolaan parkir di kota besar.
2. Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai faktor sosial dan perilaku masyarakat yang mempengaruhi penerimaan dan efektivitas kebijakan Parkir Berlangganan. Aspek resistensi terhadap teknologi dan

kebiasaan masyarakat akan menjadi bagian penting dari kajian teoritis ini, sehingga dapat memperkaya studi terkait adopsi teknologi di masyarakat urban.

3. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pengelolaan parkir yang berkelanjutan, terutama terkait dengan kebijakan parkir berlangganan dan pengaruhnya terhadap perilaku pengguna jalan dan keberadaan tukang parkir liar.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola parkir di Kota Medan, termasuk bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan sistem Parkir Berlangganan dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
2. Dengan memahami dampak dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem Parkir Berlangganan, penelitian ini dapat memberikan solusi konkret untuk mengurangi praktik pungutan liar di lokasi parkir dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
3. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan edukasi dan infrastruktur terkait penerapan teknologi Parkir Berlangganan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah adaptasi masyarakat dan mendorong penggunaan metode pembayaran non-tunai dalam pengelolaan parkir.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan akademik dalam penelitian ini, dilakukan kajian komprehensif terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi substantif dengan fokus studi. Tinjauan ini berfungsi untuk memetakan perkembangan keilmuan, mengidentifikasi temuan-temuan empiris sebelumnya, dan sekaligus menunjukkan celah pengetahuan (research gap) yang menjadi kontribusi orisinalitas penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Rangkyu, Nawawi, dan Nasution (2023) dalam karya berjudul "Analisis Kontribusi Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Dengan Pendekatan Triple Helix" memberikan kontribusi signifikan dalam dimensi ekonomi kebijakan. Temuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa implementasi sistem parkir elektronik pada 150 ruas jalan dari total 656 ruas jalan di Kota Medan berhasil meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 30%. Meskipun memberikan bukti empiris yang kuat mengenai efektivitas kebijakan dari perspektif fiskal, penelitian ini belum mengakomodasi analisis mendalam mengenai dimensi sosio-kultural dalam implementasi kebijakan tersebut.

Melengkapi penelitian sebelumnya, studi yang dilakukan oleh Bella Silvia Ananda, Kariaman Sinaga, Fandi Alfiansyah Siregar (2024) dalam "Implementasi Layanan E-Parking dalam Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Perhubungan Kota Medan" telah mulai memasuki ranah implementasi kebijakan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya resistensi masyarakat terhadap teknologi baru dan kurangnya edukasi sebagai faktor penghambat dalam adopsi

sistem e-parking. Kendati telah menyentuh aspek sosial, penelitian ini belum mengembangkan analisis yang komprehensif mengenai akar penyebab resistensi, dinamika polarisasi pandangan masyarakat, serta strategi governance dalam mengelola implementasi kebijakan.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, teridentifikasi adanya celah pengetahuan yang signifikan. Kedua penelitian tersebut telah membangun fondasi pengetahuan yang kuat mengenai dampak ekonomi dan tantangan infrastrukural, namun belum memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dimensi sosio-kultural dan politis dari implementasi kebijakan. Secara spesifik, belum ada penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai faktor-faktor determinan yang membentuk polarisasi pandangan pro dan kontra di tingkat masyarakat, strategi komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah, serta dampak perilaku yang riil terjadi pada tingkat pengguna jalan dan aktor informal seperti tukang parkir liar.

Oleh karena itu, penelitian ini berposisi untuk mengisi celah akademik tersebut melalui pendekatan kualitatif yang mendalam. Fokus penelitian tidak hanya pada outcome kebijakan melainkan pada proses sosial yang terjadi, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa perspektif yang holistik dan implementatif bagi pengembangan kebijakan transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

## 1.6 Kerangka Teori

### 1. Teori Pelayanan Publik

Teori pelayanan publik menitikberatkan pada upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui sistem pelayanan yang tepat sasaran, cepat, sederhana, terjangkau, serta dapat diukur kinerjanya (Sinambela, 2018). Adapun kualitas pelayanan publik dapat diukur menggunakan lima dimensi ServQual dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), yang meliputi bukti fisik (*tangibles*), keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Dalam penelitian ini, teori pelayanan publik dimanfaatkan untuk menilai persepsi masyarakat terhadap kebijakan parkir berlangganan barcode di Kota Medan, terutama menyangkut kemudahan dalam memperoleh stiker, kecepatan petugas dalam memindai barcode, jaminan terbebas dari pungli, serta tingkat kepuasan warga terhadap layanan yang diberikan, mengingat masih adanya kendala seperti pemberlakuan dua sistem pembayaran secara bersamaan dan keengganan sebagian masyarakat terhadap teknologi digital.

### 2. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik mengkaji serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah guna mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan umum, di mana menurut Dye (2017), kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Sementara itu, model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) menyoroti enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan, yaitu kejelasan standar dan sasaran, ketersediaan sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana,

komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana di lapangan, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, teori kebijakan publik digunakan untuk menelaah pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang parkir berlangganan, berbagai hambatan yang muncul seperti penolakan masyarakat terhadap sistem digital dan adanya dua sistem pembayaran yang berjalan simultan, serta dampak kebijakan baik yang menguntungkan (pengurangan biaya parkir masyarakat hingga 94 persen dan penurunan kebocoran PAD dari 40-50 persen menjadi di bawah 10 persen) maupun yang merugikan (kebingungan warga akibat dualisme sistem dan ketimpangan akses bagi kelompok yang kurang menguasai teknologi), sehingga dapat dipahami adanya jurang pemisah antara rancangan kebijakan dengan kenyataan di lapangan.

### 3. Teori E-Government

E-government, atau pemerintahan elektronik, adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan publik. Menurut Bank Dunia, e-government merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang mampu mengubah cara mereka berinteraksi dengan masyarakat, sektor bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya (Irawan, 2015). Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kemudahan akses dalam pelaksanaan pelayanan publik (Djabbari et al., 2023).

#### Relevansi Parkir Berlangganan Barcode dalam E-Government

Parkir Berlangganan barcode di Kota Medan merupakan implementasi nyata dari e-government yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan

efisiensi dalam pengelolaan parkir. Dengan menggunakan sistem barcode, transaksi parkir dapat dilakukan secara digital, mengurangi interaksi langsung antara pengguna dan juru parkir yang sering kali menjadi sumber masalah seperti pungutan liar. Implementasi ini sejalan dengan tujuan e-government untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Parkir Berlangganan juga menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, di mana data transaksi dapat dianalisis untuk meningkatkan kebijakan pengelolaan parkir di masa depan. Melalui pemanfaatan teknologi ini, pemerintah dapat memantau pendapatan dari retribusi parkir secara real-time, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dampak Penerapan E-Government melalui Parkir Berlangganan:

1. Peningkatan Kualitas Layanan: Dengan sistem Parkir Berlangganan, masyarakat dapat melakukan pembayaran parkir dengan lebih cepat dan mudah tanpa harus mencari uang tunai.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Data transaksi yang tercatat secara digital memungkinkan pemerintah untuk mengawasi pendapatan dari sektor parkir dengan lebih baik.
3. Pengurangan Pungutan Liar: Dengan meminimalkan interaksi fisik antara pengguna dan petugas parkir, potensi pungutan liar dapat berkurang secara signifikan.
4. Teori Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, orang, dan proses yang mendukung pengambilan keputusan (Sudrajat, 2004). Dalam konteks

pemerintahan, sistem informasi berfungsi untuk mengelola data dan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan publik. Menurut Indrajit (2002), sistem informasi yang baik harus mampu memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pengambil keputusan.

#### Relevansi Parkir Berlangganan Barcode dalam Sistem Informasi

Parkir Berlangganan barcode memanfaatkan sistem informasi untuk memproses transaksi parkir secara digital. Dengan adanya aplikasi mobile atau mesin pembayaran yang terintegrasi dengan sistem backend pemerintah, pengguna dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat. Data transaksi yang terkumpul dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut mengenai pola penggunaan parkir di Kota Medan.

Sistem informasi dalam parkir berlangganan barcode juga memungkinkan pemantauan real-time terhadap jumlah kendaraan yang terparkir serta pendapatan yang dihasilkan dari retribusi parkir. Hal ini sangat penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pengelolaan ruang publik yang lebih baik.

#### Dampak Penerapan Sistem Informasi melalui Parkir Berlangganan

1. Kemudahan Akses Informasi: Pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai lokasi parkir, tarif, dan ketersediaan tempat parkir melalui aplikasi.
2. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Pemerintah dapat menggunakan data transaksi untuk menganalisis kebutuhan ruang parkir dan merencanakan pembangunan fasilitas baru sesuai dengan permintaan.

3. Peningkatan Kepuasan Pengguna: Dengan kemudahan akses dan proses pembayaran yang cepat, kepuasan pengguna terhadap layanan parkir diperkirakan akan meningkat.

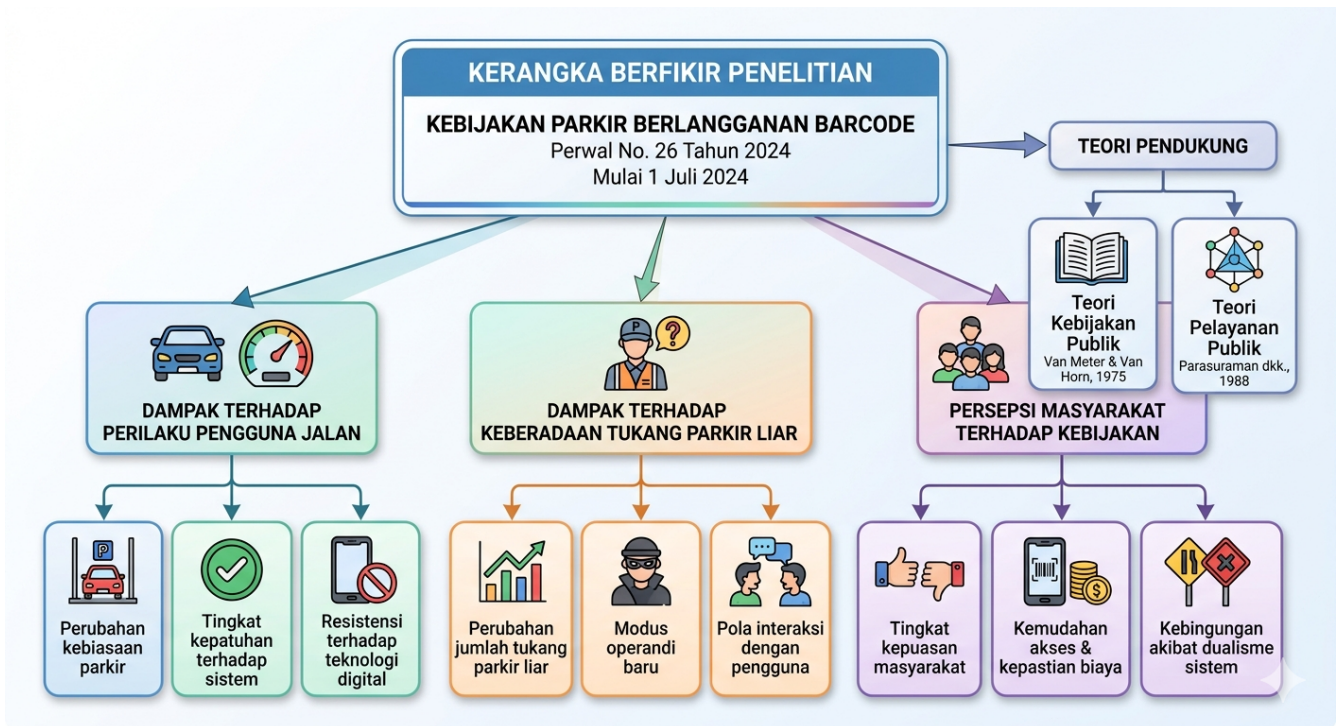
### **1.6.1 Landasan Teori Kebijakan Implementasi**

#### Teori Inovasi Kebijakan dalam Sektor Publik

Inovasi kebijakan dalam sektor publik merupakan proses introduksi dan implementasi konsep, kebijakan, atau praktik baru yang signifikan untuk mengatasi tantangan pelayanan publik (Hartley, 2005). Sistem parkir berlangganan berbasis barcode merepresentasikan bentuk inovasi kebijakan yang diamanatkan melalui \*Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017\*. Menurut Ansell dan Torfing (2014), inovasi kebijakan tidak hanya terletak pada aspek teknologinya, tetapi pada kemampuan pemerintah untuk mentransformasi model governance melalui pemanfaatan teknologi digital. Kebijakan ini menjadi instrumen strategis untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi pelayanan parkir sebagai bagian dari smart city governance.

## 1.7 Kerangka Berfikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh Penliti, 2025

Kerangka berpikir penelitian ini berpusat pada evaluasi implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Barcode yang diatur dalam Perwal No. 26 Tahun 2024 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2024. Guna membedah kebijakan tersebut secara komprehensif, penelitian ini mengandalkan dua teori pendukung utama, yaitu Teori Kebijakan Publik dari Van Meter & Van Horn (1975) serta Teori Pelayanan Publik dari Parasuraman dkk. (1988). Dari payung teoritis tersebut, alur berpikir penelitian ini kemudian diturunkan menjadi tiga dimensi analisis utama, yaitu dampak terhadap perilaku pengguna jalan, dampak terhadap keberadaan tukang parkir liar, serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan itu sendiri.

Pada dimensi pertama, fokus analisis diarahkan untuk mengukur dinamika perilaku pengguna jalan pasca-penerapan kebijakan. Hal ini dibedah secara lebih

mendetail melalui tiga indikator operasional, yaitu perubahan kebiasaan parkir masyarakat, tingkat kepatuhan mereka terhadap sistem barcode yang baru, serta resistensi atau penolakan yang muncul terhadap adopsi teknologi digital perparkiran tersebut. Melalui indikator ini, peneliti dapat melihat sejauh mana masyarakat pengguna jalan mau dan mampu beradaptasi dengan sistem nontunai yang ditawarkan.

Pada dimensi kedua, kerangka berpikir ini menyoroti dampak kebijakan terhadap keberadaan tukang parkir liar yang selama ini menjadi salah satu masalah utama perparkiran kota. Dimensi sosial ini dianalisis secara mendalam melalui tiga aspek, meliputi perubahan jumlah tukang parkir liar di lapangan (apakah berkurang atau tetap), munculnya modus operandi baru yang digunakan oleh para jukir liar untuk menyasati sistem barcode, serta bagaimana pola interaksi atau komunikasi yang terjadi antara jukir liar tersebut dengan para pengguna jasa parkir.

Terakhir, dimensi ketiga berfokus pada persepsi masyarakat secara luas terhadap berjalannya kebijakan parkir berlangganan ini. Evaluasi persepsi publik ini diukur melalui tiga indikator penting, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan baru, kemudahan akses serta kepastian biaya yang mereka rasakan, hingga aspek kritis berupa kebingungan masyarakat yang dipicu oleh adanya dualisme sistem (perpaduan atau benturan antara sistem parkir berlangganan/digital dengan sistem konvensional/manual yang masih tersisa di lapangan).

## 1.8 Operasional Konsep

Dalam penelitian ini, konsep utama yang digunakan adalah Parkir Berlangganan, pro dan kontra kebijakan, serta dampak kebijakan parkir berlangganan elektronik. Peneliti mendefinisikan masing-masing konsep secara konseptual dan operasional untuk mendukung analisis yang terfokus.

### 1. Konsep Utama: Parkir Berlangganan berbasis Barcode

Definisi Konseptual: Parkir Berlangganan adalah sistem manajemen parkir berbasis teknologi yang menggunakan barcode atau perangkat digital untuk pembayaran parkir secara elektronik. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir (Davis, 1989).

Definisi Operasional:

Sistem Parkir Berlangganan di Kota Medan diukur melalui:

- Jumlah ruas jalan yang menerapkan Parkir Berlangganan (150 dari 656 ruas).
- Persentase pengguna yang beralih ke metode pembayaran elektronik, seperti QRIS atau dompet digital.
- Efisiensi dalam pengelolaan parkir, diukur dari waktu yang dihabiskan untuk transaksi parkir dan pendapatan yang dihasilkan dari sistem ini.

### 2. Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Parkir Berlangganan

Definisi Konseptual: Persepsi masyarakat adalah pandangan, sikap, dan respons pengguna jalan terhadap kebijakan Parkir Berlangganan.

## 1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi *kasus* (*case study*). Pemilihan jenis studi kasus didasarkan pada tujuan penelitian yang

ingin memahami secara mendalam (*in-depth understanding*) fenomena penerapan kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode di Kota Medan sebagai suatu kasus yang utuh dan spesifik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dampak kebijakan (ekonomi, sosial, psikologis, dan operasional), serta menggali dampak dari sudut pandang masyarakat yang terlibat langsung oleh kebijakan tersebut.

Sesuai dengan karakteristik studi kasus dari Yin (2018), penelitian ini dilakukan dalam konteks kehidupan nyata (*real-life context*) tanpa manipulasi kondisi lapangan, menggunakan berbagai sumber data (wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen), serta berusaha memahami fenomena secara holistik dengan mempertimbangkan batasan antara kasus dan konteksnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari pengumpulan data empiris di lapangan untuk kemudian ditarik generalisasi empiris sebagai dasar penyusunan kesimpulan.

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua tipe penelitian sekaligus yang saling melengkapi, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode di Kota Medan. Melalui tipe deskriptif, penelitian ini akan memaparkan secara mendetail bagaimana proses pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, apa saja dampak positif yang dirasakan masyarakat seperti penghematan biaya parkir hingga 94 persen serta kepastian biaya tahunan, dan apa saja dampak negatif yang

muncul seperti kebingungan akibat dualisme sistem pembayaran serta resistensi masyarakat terhadap teknologi digital. Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga bersifat eksplanatif karena berusaha menjawab pertanyaan mengapa berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan ini dapat terjadi. Tipe eksplanatif digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat di balik fenomena yang ditemukan, misalnya mengapa masyarakat masih resisten terhadap sistem digital, mengapa juru parkir tetap memungut tunai meskipun kendaraan telah dilengkapi stiker barcode, serta bagaimana kebijakan ini memengaruhi perilaku pengguna jalan dan keberadaan tukang parkir liar di Kota Medan. Dengan menggabungkan kedua tipe penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif, tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi di lapangan tetapi juga menjelaskan faktor-faktor penyebab di balik setiap fenomena yang diamati.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada ruas-ruas jalan yang telah menerapkan kebijakan parkir berlangganan berbasis barcode. Pemilihan Kota Medan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada statusnya sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia yang memiliki kompleksitas permasalahan perparkiran, mulai dari kemacetan, parkir liar, hingga kebocoran pendapatan asli daerah yang mencapai 40-50 persen sebelum penerapan sistem digital. Secara spesifik, situs penelitian ditentukan secara purposive (sengaja) dengan mempertimbangkan representasi fenomena yang diteliti, yaitu ruas jalan yang telah menerapkan sistem parkir berlangganan barcode.

Dari total 656 ruas jalan yang ada di Kota Medan, baru 150 ruas yang menerapkan sistem ini, sehingga situs penelitian akan difokuskan pada beberapa ruas jalan yang mewakili karakteristik yang berbeda, seperti ruas jalan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi (kawasan pusat kota dan area komersial), ruas jalan dengan tingkat kepadatan sedang (kawasan perkantoran), serta ruas jalan dengan tingkat kepadatan rendah (kawasan pemukiman). Pemilihan situs yang beragam ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang dampak kebijakan parkir berlangganan di berbagai kondisi lapangan. Selain itu, pertimbangan lain dalam pemilihan situs adalah keberadaan tukang parkir liar dan tingkat adopsi sistem parkir berlangganan oleh masyarakat di masing-masing lokasi. Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah (natural setting) tanpa ada manipulasi kondisi lapangan, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kota Medan.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian terdiri dari:

- Pengguna Jalan: Individu yang menggunakan fasilitas Parkir Berlangganan.
- Petugas Parkir: Tukang parkir yang terintegrasi atau terdampak kebijakan.
- Pemerintah Daerah: Pejabat dari Dinas Perhubungan Kota Medan yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan.

### **1.9.4 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- Data Teks: Narasi dari wawancara dan dokumen kebijakan.

- Data Simbol: Representasi visual seperti peta lokasi Parkir Berlangganan atau dokumen retribusi parkir.
- Data Kata-Kata: Hasil transkrip wawancara dan diskusi dengan narasumber.

### **1.9.5 Sumber Data**

#### 1. Data Primer:

- Wawancara mendalam dengan pengguna jalan, petugas parkir, dan pejabat pemerintah.
- Observasi langsung di lokasi penelitian.

#### 2. Data Sekunder:

- Dokumen kebijakan, seperti peraturan daerah tentang parkir berlangganan barcode.
- Laporan statistik dari Dinas Perhubungan Kota Medan terkait penerapan Parkir Berlangganan.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi subjek penelitian.
- Observasi Langsung: Mengamati proses operasional Parkir Berlangganan di lapangan.
- Analisis Dokumen: Mengkaji kebijakan, laporan, dan dokumen resmi terkait implementasi Parkir Berlangganan.

### **1.9.7 Kualitas Data**

Kualitas data penelitian dijamin melalui:

1. Kredibilitas: Memastikan validitas data dengan triangulasi sumber (pengguna jalan, petugas parkir, dan dokumen kebijakan).
2. Otentisitas: Memahami realitas dari perspektif pelaku sosial di lapangan.
3. Historical Situatedness: Memperhatikan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam implementasi Parkir Berlangganan.

### **1.9.8 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas tiga komponen utama yang saling terkait dan berlangsung secara simultan selama proses penelitian berlangsung, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data dilakukan sejak awal pengumpulan data dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data yang relevan seperti persepsi masyarakat terhadap parkir berlangganan, perubahan perilaku pengguna jalan, keberadaan tukang parkir liar, serta kesenjangan antara Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 dengan realitas implementasi di lapangan, dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, kutipan langsung dari hasil wawancara dengan informan (pengguna jalan, petugas parkir, dan pejabat Dinas Perhubungan), serta tabel atau matriks untuk memudahkan pemahaman dan

penarikan makna. Setelah data disajikan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu menarik makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, perbedaan, serta hal-hal yang sering muncul atau justru jarang muncul. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar grounded atau berdasar pada data empiris yang terkumpul. Untuk meningkatkan keabsahan kesimpulan, peneliti juga melakukan triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber (pengguna jalan, petugas parkir, dan pejabat pemerintah) serta membandingkan data dari berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumen). Apabila ditemukan ketidakkonsistenan antar sumber atau antar teknik, peneliti akan melakukan penelusuran lebih lanjut hingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.